



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020**

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun bisa diukur dari sisi ekonomisnya.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah (PD) berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, kedepannya laporan kinerja diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural maupun karyawan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.



Sidoarjo, Februari 2021
INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19700926 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang.....	1
a) Dasar Hukum.....	1
b) Tujuan Penyusunan.....	1
1.2. Gambaran Umum OPD.....	1
a) Struktur Organisasi.....	1
b) Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3. Aspek Strategis OPD.....	7
a) Sumber Daya Aparatur.....	7
b) Aset Yang Dimiliki.....	9
c) Isu Strategis Yang Dihadapi.....	10
BAB II : PERENCANAAN	
KINERJA.....	11
2.1. Perencanaan Strategis.....	11
2.2. Rencana Kerja Tahunan.....	15
2.3. Perjanjian Kinerja.....	17
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	22
3.2. Capaian Kinerja Organisasi.....	23

a.	Pengukuran Kinerja Jangka Menengah.....	23
b.	Analisis Pencapaian Kinerja Jangka Menengah.....	23
i.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target.....	27
ii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.....	27
iii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah.....	27
iv.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan standart nasional (jika ada).....	27
v.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis.....	27
c.	Pengukuran Kinerja Tahunan.....	28
d.	Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan.....	29
i.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target.....	30
ii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.....	31
iii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah.....	32
iv.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan standart nasional (jika ada).....	33
v.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis.....	34
3.3.	Evaluasi dan Analisis Kinerja	
a.	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	35

b. Solusi dan upaya perbaikan di tahun mendatang.....	36
3.4. Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung	
3.5. Laporan Realisasi Anggaran	
3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	
3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
a. Efektivitas dan Efisiensi	
b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	
BAB IV : PENUTUP	
.....	45

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Proporsi pegawai berdasarkan status kepegawaian.....7
2. Tabel 2 Proporsi pegawai berdasarkan kapangkatan dan jabatan.....8
3. Tabel 3 proporsi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....8
4. Tabel 4 Proporsi pegawai berdasarkan rincian jabatan.....9
5. Tabel 5 Aset Inspektorat Daerah Per 31 Desember 2020.....10

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, disampaikan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100%	Sangat berhasil
		Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-
		Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi
		Persentase Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	104,17%	Sangat berhasil
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	100%	berhasil
		Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100%	berhasil

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran strategis, yaitu :

SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hambatan :

- a) Tingkat kepatuhan OPD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan eksternal dan internal cenderung rendah.
- b) Pengawasan dalam masa pandemic Covid-19

Adapun upaya – upaya yang telah dilakukan, antara lain :

Daerah upaya :

- a) Mengoptimalkan konsultasi menggunakan aplikasi e-consulting
- b) Mengoptimalkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kegiatan pengawasan
- c) Mengintensifkan pemanatauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal maupun internal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a) Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja pemerintah

b) Tujuan Penyusunan

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;

1.2. Gambaran Umum OPD

a) Struktur Organisasi

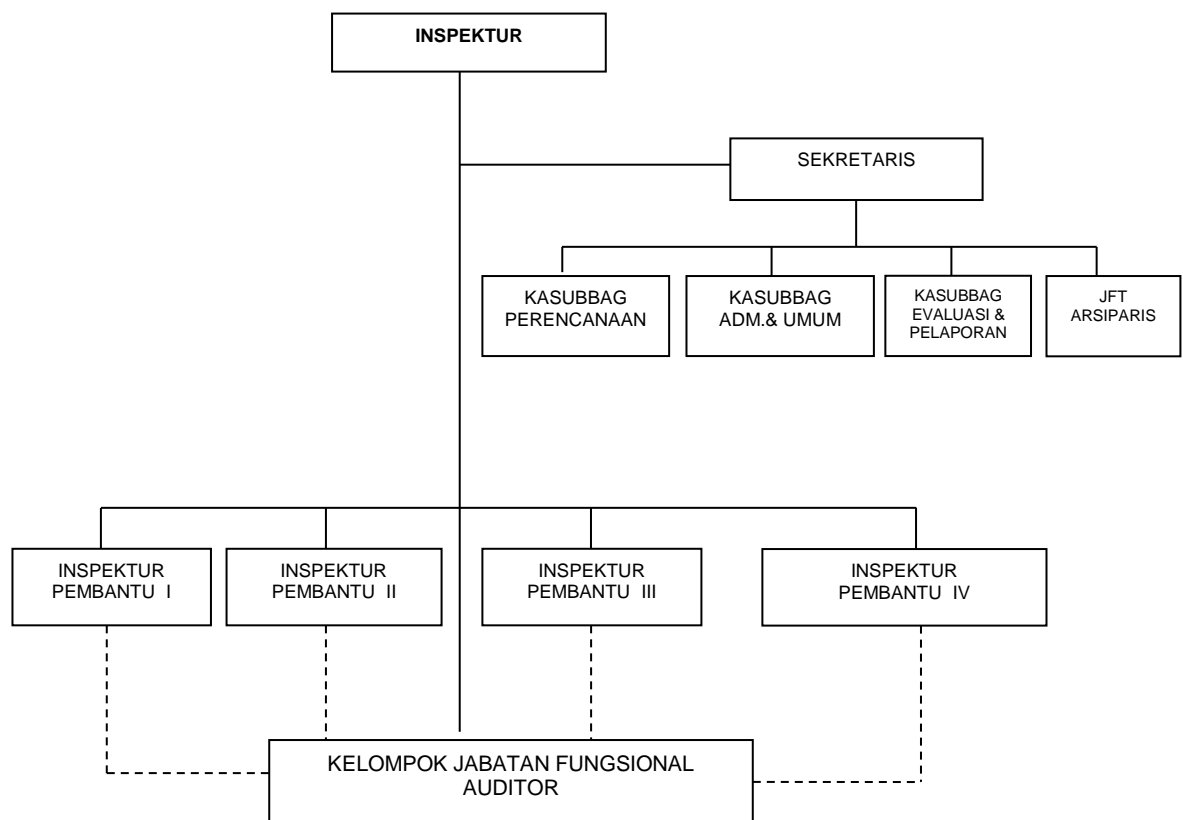
Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam tugasnya bertanggung jawab terhadap Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- 1) Unsur Pimpinan : Inspektur
- 2) Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - c) Sub Bagian Administrasi dan Umum

- 3) Unsur Pelaksana : Inspektur Pembantu, terdiri dari :
- a) Inspektur Pembantu I
 - b) Inspektur Pembantu II
 - c) Inspektur Pembantu III
 - d) Inspektur Pembantu IV
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi



b) Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Inspektorat Daerah mempunyai tugas : **“Membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa”**.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan / atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Inspektur** mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah.

➤ **Sekretariat** yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan serta evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan perpustakaan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelayanan administrasi;
- f. Evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugasnya.

➤ **Inspektur Pembantu I**

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan dan Desa / Kelurahan :

- a. Kecamatan Sidoarjo dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Sidoarjo;
- b. Kecamatan Buduran dan Desa di wilayah Kecamatan Buduran;
- c. Kecamatan Candi dan Desa di wilayah Kecamatan Candi;
- d. Kecamatan Tanggulangin dan Desa di wilayah Kecamatan Tanggulangin;
- e. Kecamatan Porong dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Porong;
- f. Kecamatan Jabon dan Desa di wilayah Kecamatan Jabon;
- g. Kecamatan Krebung dan Desa di wilayah Kecamatan Krebung;
- h. Kecamatan Prambon dan Desa di wilayah Kecamatan Prambon;
- i. Kecamatan Tulangan dan Desa di wilayah Kecamatan Tulangan;
- j. Kecamatan Gedangan dan Desa di wilayah Kecamatan Gedangan;
- k. Kecamatan Sedati dan Desa di wilayah Kecamatan Sedati;
- l. Kecamatan Waru dan Desa di wilayah Kecamatan Waru;
- m. Kecamatan Sukodono dan Desa di wilayah Kecamatan Sukodono;
- n. Kecamatan Taman dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Taman;
- o. Kecamatan Krian dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Krian;
- p. Kecamatan Wonoayu dan Desa di wilayah Kecamatan Wonoayu;
- q. Kecamatan Balongbendo dan Desa di wilayah Kecamatan Balongbendo;
- r. Kecamatan Tarik dan Desa di wilayah Kecamatan Tarik;

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi :

1. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;

2. Memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
3. Melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Memberikan jasa konsultasi pengelolaan keuangan desa/kelurahan;
5. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Daerah;
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan asset desa/kelurahan;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

➤ **Inspektur Pembantu II**

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. BUMD;
- g. Kecamatan;

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi :

1. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
2. Memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
3. Melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah;
4. Melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah melalui audit kinerja;
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPIP;
6. Melakukan pengawasan terhadap laporan kinerja pemda;
7. Melakukan pengawasan pelaksanaan zona integritas;

8. Melakukan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
9. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

➤ **Inspektur Pembantu III**

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntansi dan asset daerah :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. BUMD;

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:

1. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
2. Memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
3. Melakukan pengawasan terhadap dokumen perencanaan dan anggaran;
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan infrastruktur;
6. Melakukan pengawasan atas pengelolaan barang milik daerah;
7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan serapan anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah;
8. Melakukan stock opname dan audit operasional/ audit ketaatan;
9. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Daerah;
10. Melakukan konsulting atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset daerah;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

➤ **Inspektur Pembantu IV**

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap investigasi, pengaduan dan pencegahan korupsi :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. BUMD;
- g. Kecamatan dan desa/kelurahan;

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi :

1. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan;
2. Memberikan petunjuk dan membimbing dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaporan gratifikasi;
4. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan penanganan kasus/ audit investigasi/ audit PKKN/ audit PKN;
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaporan RAD PPK/ MCP dan LHKASN;
7. Melakukan pengawasan atas terjadinya benturan kepentingan;
8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan whistle blowing system;
9. Melakukan pengawasan dalam rangka implementasi perjanjian kerjasama APIP-APH (koordinasi, tukar-menukar informasi serta kegiatan lainnya);
10. Melakukan pengawasan saber pungli
11. Melakukan pengawasan penyalahgunaan wewenang/ korupsi menjadi kinerja investigasi;
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

➤ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.

c) Aspek Strategis OPD

a. Sumber Daya Aparatur

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang yang optimal. Jumlah pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 65 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 1
Proporsi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jenis Kepegawaian	Jumlah	Ket.
1.	Pegawai Negeri Sipil	60	
2.	Tenaga Kontrak	5	
	Jumlah	65	

Sumber data : Subbag Administrasi dan Umum Desember 2020

Tabel 2
Proporsi Pegawai berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan

No	Kepangkatan	Eselon					Jumlah
		II	III	IV	Fungsional	Staf	
1.	Golongan IV	1	4	-	12	-	17
2.	Golongan III	-	-	3	17	9	29
3.	Golongan II	-	-	-	6	8	14
4.	Golongan I	-	-	-	-	-	-
5.	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	5	5
	Jumlah	1	4	3	34	23	65

Sumber data: Subbag Administrasi dan Umum Desember 2020

Tabel 3
Proporsi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan Formal	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S-2)	8
2.	Sarjana (S-1)	32
3.	Sarjana Muda	12
4.	SLTA	11
5.	SLTP	2
	JUMLAH	65

Sumber data : Subbag Administrasi dan Umum Desember 2020

Tabel 4
Proporsi Pegawai Berdasarkan Rincian Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur	1
2.	Sekretaris	1
3.	Inspektur Pembantu	3
4.	Kepala Sub Bagian	3
5.	Pengadministrasi Umum	3
6.	Pengadministrasi sarana prasarana	1
7.	Pengelola Kepegawaian	1
8.	Pengelola Gaji	1
9.	Pengelola Data Evaluasi dan Pelaporan	1
10.	Pengelola Pengawasan	1
11.	Pengelola Keuangan	1
12.	Bendahara	1
13.	Pengemudi	3
14.	Petugas Keamanan	4
15.	Pramu Bakti	1
16.	Auditor Madya	12
17.	Auditor Muda	13
18.	Auditor Pertama	1
19.	Auditor Pelaksana	6
20.	Audiwan	2
21.	Arsiparis	1

22.	Tenaga IT	2
23.	Cleaning Service	2
Jumlah		65

Sumber data : Subbag Administrasi dan Umum Desember 2020

b. Aset Yang Dimiliki

Tabel 5
Aset Inspektorat Daerah Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Total
1.	Aset lancar	Rp. 22.195.234,00
	Persediaan	Rp. 22.195.234,00
2.	Investasi jangka Panjang	Rp. 0,00
	-	-
3.	Aset Tetap	Rp. 14.084.718.406,45
	Tanah	Rp. 5.472.578.958,00
	Peralatan dan Mesin	Rp. 1.674.684.709,07
	Gedung dan Bangunan	Rp. 6.904.932.895,38
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 18.599.844,00
	Aset tetap lainnya	Rp. 13.922.000,00
4.	Aset lainnya	Rp. 1.411.264,00
	Aset tidak berwujud	Rp. 0,00
	Aset lain-lain	Rp. 1.411.264,00
	TOTAL ASET	Rp. 14.108.324.904,45

Sumber data : Neraca Inspektorat per 31 Desember 2020

c. Isu Strategis Yang Dihadapi

- 1) Pengawasan dengan prokes ketat karena dalam masa pandemic Covid-19;
- 2) Masih adanya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun-tahun sebelumnya yang belum terselesaikan;
- 3) Obrik kurang respon atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menjadi kewajibannya meskipun sudah diberikan peringatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

a. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

Perencanaan strategis Inspektorat Daerah memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Misi RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan RPJMD Kab. Sidoarjo	Sasaran RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan Renstra Inspektorat Daerah	Sasaran Renstra Inspektorat Daerah
Misi 1: Pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui optimalisasi pengendalian internal	Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

b. Matriks Rencana Strategis

Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui optimalisasi pengendalian internal Indikator Kinerja

- Tujuan : 1. Nilai SAKIP Kabupaten (target tahun 2021 A)
 2. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo (target Tahun 2021 Terdefinisi)
 3. Opini atas audit BPK (target Tahun 2021 WTP)

No	Sasaran Strategis		Definisi Operasional Dan Formula Perhitungan	Thn. Dasar	Target Tahunan					Strategi Pencapaian		Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator Kinerja		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	Jumlah OPD nilai SAKIP minimal B/Jumlah semua OPD x 100%	44,68%	55,31%	63,82%	100%	100%	100%	Peningkatan pengawasan internal berkala dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Inspektur Pembantu I,II,III dan IV
		Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	Jumlah OPD bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan Negara/Jumlah Semua OPD x 100%	0%	2,12%	2,12%	2,04%	0%	2,04%			
		Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	Tingkat terdefiisi ((3,0≤skor≥ 4,0)	n/a	n/a	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi			

		Persentase Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	Jumlah Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan Negara/Jumlah Semua Desa x 100%	0,31%	0,31%	0,62%	0,62 %	0%	0,93%			
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi eksternal yang ditindaklanjuti/jumlah semua rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal x 100%	98,20%	98,50%	99,00%	94,24%	96%	98,00%			
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang ditindaklanjuti/jumlah semua	99,42%	99,50%	99,65%	72,18%	75%	78,00%			

			rekomen si hasil pemeriksa an Inspektorat x 100%									
		Persentase pengaduan /kasus yang ditindaklanj uti	Jumlah pengaduan /kasus yang ditindaklanj uti/Jumlah semua pengaduan /kasus yang masuk di Inspektorat x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

2.2 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis		Target 2020	Program		Target 2020	Kegiatan		Target 2020	Anggaran
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkat nya akuntabilita s dalam penyeleng garaan Pemerinta han Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100%	Peningkatan pengawasan internal berkala dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100%	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah laporan hasil evaluasi yang disusun	76 laporan	Rp1.070.921.300.000,-
		Persentase Perangkat Daerah bebas temuan	0%		Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang	0%		Jumlah laporan hasil pemeriksaan tertentu yang	75 laporan	

		administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara			berakibat kerugian keuangan negara			disusun		
		Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	Terdefinisi		Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	Terdefinisi		Jumlah laporan hasil audit yang disusun	18 laporan	
		Persentase Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	0%		Persentase Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	0%		Jumlah laporan hasil konsultasi yang disusun	2 laporan	
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	96%		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	96%		Jumlah laporan hasil monitoring yang disusun	87 laporan	
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	75%		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	75%		Jumlah laporan hasil sosialisasi yang disusun	3 laporan	
		Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100%		Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100%		Jumlah laporan hasil penilaian ZI yang disusun	8 laporan	
								Jumlah laporan hasil penilaian mandiri SPIP	0 laporan	

								Jumlah laporan hasil reviu yang disusun	65 laporan	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------	--

2.2. Perjanjian Kinerja

1) Perjanjian Kinerja Kepala OPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020
1.	Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	a. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti b. Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti c. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi d. Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B e. Persentase Perangkat daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara f. Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara g. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti	96% 100% Terdefinisi 100% - - 75%

2) Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III

No.	Program	Indikator Program	Target Tahun 2020	Penanggung Jawab
1.	Pelayanan kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	75 %	Sekretaris

2.	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	a. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	96%	Inspektur Pembantu I dan III
		b. Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100%	Inspektur Pembantu IV
		c. Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal B	terdefinisi	Inspektur Pembantu II
		d. Persentase Perangkat daerah yang nilai SAKIP minimal B	100%	Inspektur Pembantu II
		e. Persentase Perangkat daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan Negara	-	-
		f. Persentase Desa bebas dari temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-
		g. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti	75%	Inspektur Pembantu I dan III

3) Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2020	Penanggung Jawab
1.	a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah dokumen perencanaan yang disusun ➤ Jumlah dokumen penganggaran yang disusun ➤ Jumlah dokumen perencanaan pengawasan yang disusun 	<p>7 dokumen</p> <p>4 dokumen</p> <p>1 dokumen</p>	Kasubbag Perencanaan
	b. Monitoring dan evaluasi kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang disusun 	4 dokumen	Kasubbag Perencanaan
2.	<p>a. Penyediaan barang/jasa perkantoran;</p> <p>b. Kegiatan Kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri;</p> <p>c. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur;</p> <p>d. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia ➤ Jumlah BBM yang disediakan ➤ Jumlah buku bahan bacaan dan Koran yang tersedia ➤ Jumlah jam lembur yang terbayar ➤ Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan ➤ Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia ➤ Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara ➤ Jumlah pengelola keuangan dan bayar yang terbayar 	<p>6645 buah</p> <p>10.400 liter</p> <p>1524 buah</p> <p>0 jam</p> <p>3200 kotak</p> <p>338 buah</p> <p>750M2</p> <p>14 orang/bln</p>	Kasubbag Administrasi dan Umum

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan ➤ Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya ➤ Jumlah surat keluar masuk yang dikelola ➤ Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti ➤ Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar ➤ Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara ➤ Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara ➤ Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia ➤ Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan 	<p>62 unit</p> <p>12 unit</p> <p>2450 buah</p> <p>100%</p> <p>12 bulan</p> <p>12 unit</p> <p>16 unit</p> <p>5 orang</p> <p>2 unit</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah administrasi kepegawaian yang didokumentasikan 	4 laporan	Kasubbag Administrasi dan Umum
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah laporan keuangan yang tersusun 	13 laporan	Kasubbag Administrasi dan Umum

		➤ Jumlah laporan BMD yang tersusun	4 laporan	Kasubbag Administrasi dan Umum
3.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	➤ Jumlah laporan hasil audit yang disusun ➤ Jumlah laporan hasil evaluasi yang disusun ➤ Jumlah laporan hasil konsulting yang disusun ➤ Jumlah laporan hasil monitoring yang disusun ➤ Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun ➤ Jumlah laporan hasil review yang disusun ➤ Jumlah laporan hasil sosialisasi yang disusun ➤ Jumlah laporan penilaian mandiri SPIP yang disusun ➤ Jumlah laporan penilaian ZI yang disusun	18 laporan 76 laporan 2 laporan 87 laporan 75 laporan 65 laporan 3 laporan 0 laporan 8 laporan	Kasubbag Evaluasi dan Laporan

4) Anggaran Per Program /Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	5.198.968.950,00
	Penyediaan Barang/Jasa Perkantoran	1.650.461.300,00
	Kegiatan Kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	876.332.500,00
	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	2.037.975.150,00
	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	634.200.000,00

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.070.921.300,00
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	1.070.921.300,00
Jumlah	6.269.890.250,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100%	100% (48/48 OPD)	100%
		Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-	-
		Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi (skor 3,09)	100%
		Persentase Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-	-
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	96%	104,17% (930/930 rekomendasi)	104,17%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	75%	75% (123/164 rekomendasi)	100%
		Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100%	100% (144/144 kasus)	100%

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Kinerja Jangka Menengah

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Tahun 2021	Realisasi di Tahun 2020	Capaian (%)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik melalui optimalisasi pengendalian internal	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo	terdefinisi	terdefinisi	100%
		Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo	A	*)	-
		Opini atas Audit BPK	WTP	*)	-

b. Analisis Pencapaian Kinerja Jangka Menengah

i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target

No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi s.d Tahun 2020	Target s.d Tahun 2020	Capaian (%)
1.	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo	terdefinisi	terdefinisi	100%
2.	Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo	*)	A	-
3.	Opini atas audit BPK	*)	WTP	-

ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1.	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo	berkembang	terdefinisi	terdefinisi
2.	Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo	A	A	*)

3.	Opini atas audit BPK	WTP	WTP	*)
----	----------------------	-----	-----	----

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo terdefinisi, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai serta telah diimplementasikan pada seluruh kegiatan. Untuk 2 (dua) indikator yang lainnya yaitu Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo dan Opini atas audit BPK belum dapat diketahui persentasenya dikarenakan nilai dari 2 (dua) indikator tersebut sampai laporan ini tersusun belum keluar.

iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi s.d Tahun 2020	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1.	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo	terdefinisi	terdefinisi	100%
2.	Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo	*)	A	100%
3.	Opini atas audit BPK	*)	WTP	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi target jangka menengah yaitu terdefinisi. Namun nilai maturitas SPIP perlu ditingkatkan lagi secara sistematis.

iv. Perbandingan antara capaian kinerja dengan standart nasional

No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi Tahun 2020	Target Nasional	Capaian (%)
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

v. Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis

No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi Tahun 2020	Target Instansi Sejenis	Capaian (%)
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

c. Pengukuran Kinerja Tahunan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100%	100% (48/48 OPD)	100%
		Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-	-
		Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi (skor 3,09)	100%
		Persentase Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-	-
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	96%	104,17% (930/930 rekomendasi)	104,17%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	75%	75% (123/164 rekomendasi)	100%
		Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

				(144/144 kasus)	
--	--	--	--	-----------------	--

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 5 indikator sasaran rata-rata capaian kinerja 100,83% dan dapat dikatakan **sangat berhasil**. 2 (dua) indikator yaitu persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian negara dan persentase desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian Negara tidak dapat ditargetkan dikarenakan pengawasan pada tahun 2020 difokuskan pada pendampingan/asistensi penanganan pandemi Covid 19.

d. Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan

i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2020	Capaian (%)
1.	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100% (48/48 OPD)	100%	100%
2.	Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-	-
3.	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	terdefinisi (skor 3,09)	terdefinisi	100%
4.	Persentase Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-	-
5.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	104,17% (930/930 rekomendasi)	96%	104,17%
6.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	75% (123/164 rekomendasi)	75%	100%

7.	Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100% (144/144 kasus)	100%	100%
----	---	-------------------------	------	------

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi masing-masing indikator sasaran telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dengan rata-rata capaian 100,83% dengan kategori sangat berhasil. Rata-rata capaian di atas 100% ini didongkrak dari upaya secara intensif terhadap penanganan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dari target 96% terealisasi 104,17% (930 rekomendasi secara kumulatif).

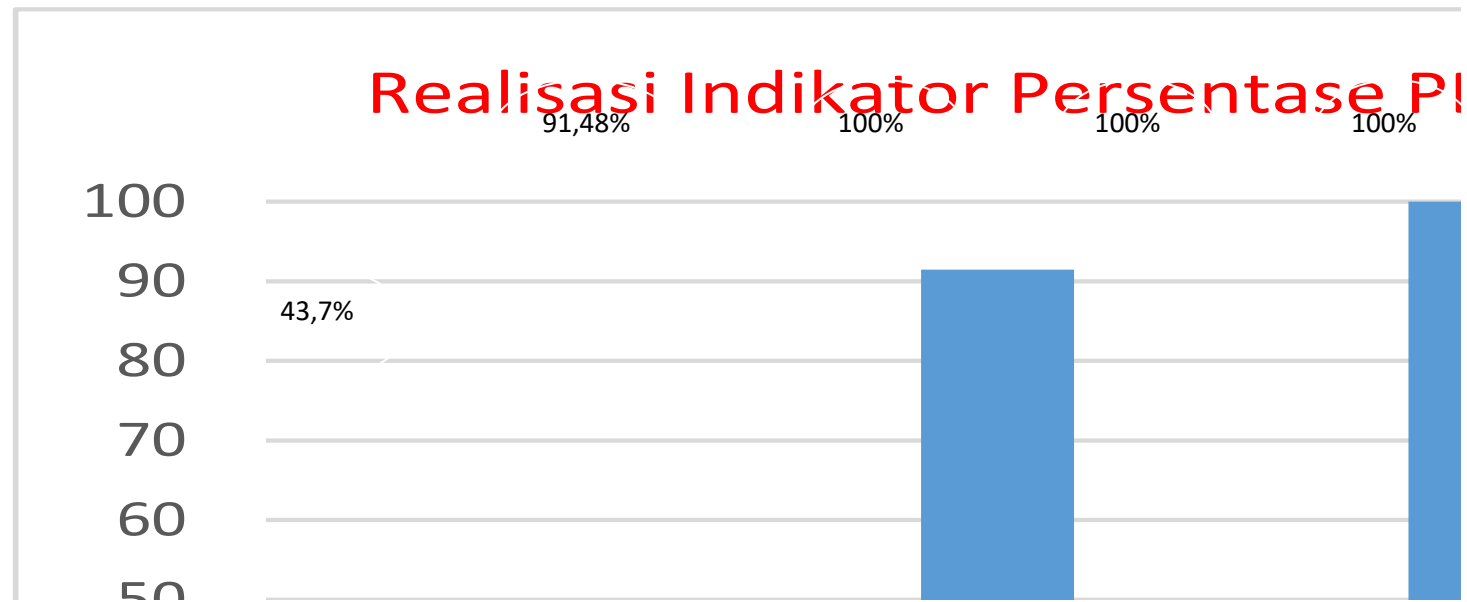
ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1.	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100% (47/47)	100% (48/48)	100% (48/48 OPD)
2.	Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	0%	-	-
3.	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi (Skor 3,09)	terdefinisi (Skor 3,09)
4.	Persentase Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	1,24% (4/322)	-	-
5.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	94,24% (589/625)	99,88% (844/845)	104,17% (930/930 rekomendasi)
6.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	72,18% (558/773)	89,82% (600/668)	75% (123/164 rekomendasi)
7.	Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100% (45 kasus)	91,18% (31/34)	100% (144/144 kasus)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi masing-masing indikator sasaran 3 tahun terakhir menunjukkan tren positif, dari masing-masing indikator menunjukkan peningkatan realisasinya. Capaian masing-masing indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator : Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B

Pada indikator ini tren positif sudah terlihat mulai tahun 2017, dari target 55,31% realisasi 91,48% begitu juga tahun-tahun berikutnya menunjukkan kenaikan baik pada realisasi maupun capaian kinerjanya. Ini berarti nilai SAKIP OPD yang minimal B dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Realisasi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Upaya peningkatan nilai SAKIP OPD terus dilakukan, salah satu upaya yang dilakukan adalah pendampingan secara khusus kepada 8 (delapan) OPD bernilai B pada tahun 2019. Dan upaya tersebut membuahkan hasil terbukti pada tahun 2020 tidak ada OPD yang bernilai B, artinya nilai SAKIP OPD meningkat dari minimal B pada tahun 2019 menjadi minimal BB pada tahun 2020.

Indikator : Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi

Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dari level berkembang menjadi terdefinisi, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai serta telah diimplementasikan pada seluruh kegiatan. Pada tahun 2019 telah dilakukan *self assessment* atas maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan nilai 3,7273 dan pada tahun yang sama BPKP Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan *quality assurance* (QA) Nomor : SP-1354/D3/04/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan nilai 3,0909 dengan nilai perubahan 0,6364. Namun sampai akhir tahun 2020 penetapan atas maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diusulkan oleh BPKP Provinsi Jawa Timur kepada BPKP Pusat Jakarta masih belum turun.

Walaupun penetapan atas maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diusulkan oleh BPKP Provinsi Jawa Timur belum ditetapkan oleh BPKP Pusat Jakarta, upaya meningkatkan maturitas SPIP terus dilakukan, dengan terus memotivasi agar antusias OPD meningkat dalam memitigasi risiko baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Upaya membangkitkan semangat OPD dalam memitigasi risiko dilakukan dengan jalan asistensi, konsulting, dan monitoring. Pada tahun 2020 upaya tersebut ditingkatkan dengan memasukan nilai SPIP OPD pada penilaian SAKIP, sehingga penilain SAKIP OPD pada tahun 2020 menggunakan komposisi sebagai berikut :

1. Nilai LKE SAKIP dengan bobot 95%
2. Nilai SPIP (hasil penilaian risiko OPD) dengan bobot 5%

Upaya tersebut berhasil memicu OPD untuk melakukan penilaian risiko dengan tingkat pengumpulan 100% (48 OPD).

Indikator : Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tren tindak lanjut atas rekomendasi BPK dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, hanya pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,62% dibanding tahun 2017, hal ini disebabkan 36 rekomendasi masih dalam proses verifikasi oleh BPK dan sudah terselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 persentase tindak lanjut telah

mencapai sesuai target yang diharapkan, dari jumlah komulatif rekomendasi BPK sebanyak 930 rekomendasi telah ditindaklanjuti seluruhnya pada tahun 2020 sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 100%.

Indikator : Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti

Rata-rata capaian kinerja pada indikator ini sebesar 93,42% dengan kategori **berhasil**, namun pada tahun 2017 dan 2018 capaian kinerja dibawah 80% hal ini disebabkan jadwal pemeriksaan ada pada akhir tahun sehingga proses tindaklanjut tidak cukup waktu pada tahun berjalan. Upaya perbaikan penjadwalan dan teknik pemeriksaan telah dilakukan dan dapat dilihat kurun waktu 2 tahun yaitu tahun 2019 dan 2020 capaian kinerja telah mencapai lebih dari 100%. Pada tahun 2019 dari 668 rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 600 rekomendasi dengan capaian 124,44% dari target yang ditetapkan sebesar 72,18% (482 rekomendasi) realisasi 89,82% (600 rekomendasi). Pada tahun 2020 juga menunjukkan tren positif dari 164 rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 123 rekomendasi dengan tingkat capaian 100% dari target yang ditetapkan 75% (123 rekomendasi) realisasi 75% (123 rekomendasi).

Indikator : Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti

Keseriusan dalam menangani kasus/pengaduan masyarakat dapat dilihat dari capaian kinerja indikator kinerja ini. Mulai tahun 2016 sampai tahun 2020, rata-rata capaian kinerja sebesar 98,24% dengan kategori **berhasil**. Pada tahun 2020 realisasi indikator ini mengalami kenaikan 0,12% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2019 kasus/pengaduan yang masuk APIP sebanyak 34 kasus/pengaduan dan yang selesai ditindaklanjuti 31 kasus/pengaduan dengan tingkat capaian 91,18%, hal ini disebabkan kasus/pengaduan masuk akhir bulan Desember 2019 sehingga tidak cukup waktu untuk menindaklanjuti dan proses tindak lanjut dilanjutkan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 kasus/pengaduan yang masuk ke APIP naik secara drastis sebanyak 144 kasus/pengaduan (termasuk 3 kasus/pengaduan tahun 2019 yang belum selesai ditindaklanjuti) dan seluruh kasus/pengaduan yang masuk tahun ini selesai ditindaklanjuti seluruhnya dengan tingkat capaian kinerja 100%.

iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1.	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100% (48/48 OPD)	100%	100%
2.	Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	2,04%	-
3.	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	terdefinisi (skor 3,09)	terdefinisi	100%
4.	Persentase Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	0,93%	-
5.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	104,17% (930/930 rekomendasi)	98%	106,30%
6.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	75% (123/164 rekomendasi)	78%	96,15%
7.	Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100% (144/144 kasus)	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi 5 indikator sasaran jika dibanding dengan target akhir renstra capaian rata-rata 100,4% dengan kategori **sangat berhasil**, namun ada 2 indikator sasaran yang belum memenuhi target yaitu indikator persentase perangkat daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian Negara dan persentase desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian Negara, hal ini dikarenakan tahun 2020 pengawasan difokuskan pada penanganan Covid 19.

iv. Perbandingan antara capaian kinerja dengan standart nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Nasional	Capaian (%)
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

v. Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Nasional	Capaian (%)
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

a. Analisis Kebersihan dan Kegagalan

Pengukuran Keberhasilan Kinerja jangka Menengah OPD

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Capaian (%)	Kategori	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik melalui optimalisasi pengendalian internal	1. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten	100%	berhasil	Inspektur Kabupaten Sidoarjo
		2. Nilai SAKIP Kabupaten	*)	-	
		3. Opini atas audit BPK	*)	-	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator tujuan (Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo) kategori terdefinisi dengan capaian 100%, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai serta telah diimplementasikan pada seluruh kegiatan. Untuk 2 (dua) indikator tujuan lainnya yaitu Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo dan Opini atas audit BPK belum dapat diketahui persentase capaian kerjanya dikarenakan nilai dari 2 (dua) indikator tersebut sampai laporan ini tersusun belum keluar sehingga belum dapat diukur.

Pengukuran Keberhasilan Kinerja Tahunan OPD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian (%)	Kategori	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal B	100%	berhasil	Inspektur Pembantu II
		2. Persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-	-
		3. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi	100%	berhasil	Inspektur Pembantu II
		4. Persentase Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan negara	-	-	-
		5. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	104,17%	Sangat berhasil	Inspektur Pembantu I dan III
		6. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	100%	berhasil	Inspektur Pembantu I dan III
		7. Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100%	berhasil	Inspektur Pembantu IV

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 5 indikator sasaran rata-rata capaian kinerja 100,83% dan dapat dikatakan **sangat berhasil**. 2 (dua) indikator sasaran yaitu persentase Perangkat Daerah bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian negara dan persentase desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian Negara tidak dapat ditargetkan dikarenakan pengawasan pada tahun 2020 difokuskan pada pendampingan/asistensi penanganan pandemi Covid 19.

Pada indikator persentase perangkat daerah yang nilai SAKIP minimal B dengan capaian kinerja 100% telah dilakukan peningkatan nilai SAKIP OPD dengan melaksanakan pendampingan secara khusus kepada 8 (delapan) OPD bernilai B pada tahun 2019. Dan upaya tersebut membuahkan hasil terbukti pada tahun 2020 tidak ada OPD yang bernilai B, artinya nilai SAKIP OPD meningkat dari minimal B pada tahun 2019 menjadi minimal BB pada tahun 2020. Upaya peningkatan pada indikator ini terus akan dilakukan dengan target menambah jumlah OPD bernilai A.

Pada indikator tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo minimal terdefinisi, capaian kinerja pada indikator ini telah mencapai 100% dengan kategori **sangat berhasil**, walaupun penetapan atas maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diusulkan oleh BPKP Provinsi Jawa Timur belum ditetapkan oleh BPKP Pusat Jakarta, upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan maturitas SPIP terus dilakukan, Pemerintah kabupaten Sidoarjo terus memotivasi agar antusias OPD meningkat dalam memitigasi risiko baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Upaya membangkitkan semangat OPD dalam memitigasi risiko dilakukan dengan jalan asistensi, konsultasi, dan monitoring. Pada tahun 2020 upaya tersebut ditingkatkan dengan memasukkan nilai SPIP OPD pada penilaian SAKIP, sehingga penilai SAKIP OPD pada tahun 2020 menggunakan komposisi sebagai berikut :

1. Nilai LKE SAKIP dengan bobot 95%
2. Nilai SPIP (hasil penilaian risiko OPD) dengan bobot 5%

Upaya tersebut berhasil memicu OPD untuk melakukan penilaian risiko dengan tingkat pengumpulan 100% (48 OPD)

Pada indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti, capaian kinerja sebesar 104.17% dengan kategori **sangat berhasil**, pada tahun 2020 persentase tindak lanjut telah mencapai sesuai target yang diharapkan, dari jumlah komulatif rekomendasi BPK sebanyak 930 rekomendasi telah ditindaklanjuti seluruhnya pada tahun 2020 sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 100%.

Pada indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang ditindaklanjuti, capaian kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan dapat dikategorikan **sangat berhasil**, pada tahun 2020 dari 164 rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 123 rekomendasi dengan tingkat capaian 100% dari target yang ditetapkan 75% (123 rekomendasi) realisasi 75% (123 rekomendasi).

Pada indikator Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti, capaian kinerja telah mencapai 100% dan dapat dikatakan **sangat berhasil**, ini merupakan Keseriusan Inspektorat daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani kasus/pengaduan masyarakat, hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 realisasi indikator ini mengalami kenaikan 0,12% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2019 kasus/pengaduan yang masuk APIP sebanyak 34 kasus/pengaduan dan yang selesai ditindaklanjuti 31 kasus/pengaduan dengan tingkat capaian 91,18%. Pada tahun 2020 kasus/pengaduan yang masuk ke APIP naik secara drastis sebanyak 144 kasus/pengaduan (termasuk 3 kasus/pengaduan tahun 2019 yang belum selesai ditindaklanjuti) dan seluruh kasus/pengaduan yang masuk tahun ini selesai ditindaklanjuti seluruhnya dengan tingkat capaian kinerja 100%.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2020 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo rata-rata 104,17% dengan kategori sangat berhasil. Dari 7 (tujuh) indikator sasaran strategis yang belum mencapai target adalah indikator Persentase Perangkat Daerah dan Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan Negara. 2 (dua) Indikator tersebut tidak ditargetkan pada tahun 2020 dikarenakan pengawasan difokuskan pada penanganan pandemic Covid-19.

Sebagai upaya perbaikan agar tahun berikutnya indikator sasaran dapat meningkatkan secara kualitatif dan kuantitatif, maka upaya yang akan dilakukan adalah :

- a. Mengoptimalkan kegiatan asistensi, monitoring, evaluasi dan pengawasan lainnya pada perangkat daerah dan desa.
- b. Peningkatan kompetensi auditor agar lebih smart dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Melakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berkala terutama Persentase Perangkat Daerah dan Desa bebas temuan administrasi yang berakibat kerugian keuangan Negara.

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis Inspektorat tahun ini sebesar 12,9 akan kami tingkatkan pada tahun berikutnya.